



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersama dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah kabupaten guna mengatur ketersediaan anggaran dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 4

- (1) SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran kas apabila perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang tercantum dalam anggaran kas SKPD tidak sesuai dengan perkiraan.
- (2) SKPD yang akan melakukan pergeseran anggaran kas, menyampaikan surat permohonan pergeseran anggaran kas kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran kas yang telah disetujui oleh PPKD agar disesuaikan dalam anggaran kas DPA-SKPD berkenanan.

Pasal 5

Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 04 - 11 - 2014

le **BUPATI LEBONG,** *lv*

20/11/14

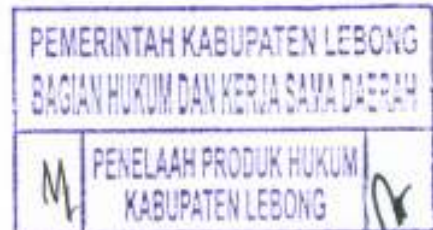
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 04 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

Ri

MIRWAN EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran I : Penetapan Bupati Lebong
 Nomor 40 Tahun 2014
 Tanggal 04 - 11 - 2014

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 ANGGARAN KAS PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

No	SKPD	Pagu Anggaran Penerimaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda Dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	200.000.000,00	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67
4	Dinas Pekerjaan Umum	300.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	200.000.000,00	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100.000.000,00	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	-	-	-	-	-	-	-
11	Kantor Kesbang/Limas	-	-	-	-	-	-	-
12	Kantor satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
13	Sekretariat Daerah	350.000.000,00	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67
14	KDHI/Wakil KDH	-	-	-	-	-	-	-
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	517.517.379.758,00	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17
17	Inspektoral	-	-	-	-	-	-	-
18	Kantor Penghubung	100.000.000,00	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33
19	Kecamatan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-
20	Kelurahan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-
21	Kecamatan Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-
22	Kelurahan Turan Lalang	-	-	-	-	-	-	-
23	Kelurahan Mubal	-	-	-	-	-	-	-
24	Kelurahan Taba Anyar	-	-	-	-	-	-	-
25	Kelurahan Tes	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-
27	Kelurahan Embong Panjang	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Lebong Utara	-	-	-	-	-	-	-
29	Kelurahan Pasar Muara Aman	-	-	-	-	-	-	-
30	Kelurahan Kampung Jawa	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-
33	Kantor Pelayanan Terpadu	300.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
34	Kecamatan Topos	-	-	-	-	-	-	-
35	Kelurahan Topos	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Lebong sakti	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Amen	-	-	-	-	-	-	-
39	Kelurahan Amen	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Uluh Jaya	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67	21.666.666,67
4	Dinas Pekerjaan Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33	13.333.333,33
8	Dinas Sosial,Tenaga Kerja , Transmigrasi	-	-	-	-	-	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	-	-	-	-	-	-
11	Kantor kesbang/Lnmas	-	-	-	-	-	-
12	Kantor satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
13	Sekretariat Daerah	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67
14	KDHWakil KDH	-	-	-	-	-	-
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17	43.126.448.313,17
17	Inspektorat	-	-	-	-	-	-
18	Kantor Penghubung	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33
19	Kecamatan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-
20	Kelurahan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-
21	Kecamatan Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-
22	kelurahan Turan Lalang	-	-	-	-	-	-
23	Kelurahan Mubal	-	-	-	-	-	-
24	kelurahan Taba Anyar	-	-	-	-	-	-
25	Kelurahan Tes	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Kelurahan Embang Panjang	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Lebong Utara	-	-	-	-	-	-
29	Kelurahan Pasar Muara Aman	-	-	-	-	-	-
30	Kelurahan Kampung Jawa	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Lebong Atas	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Padang Bano	-	-	-	-	-	-
33	Kantor Pelayanan Terpadu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
34	Kecamatan Topos	-	-	-	-	-	-
35	Kelurahan Topos	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Binang Kuning	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Lebong sakti	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Amen	-	-	-	-	-	-
39	Kelurahan Amen	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Uram Jaya	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Pinang Belepis	-	-	-	-	-	-


No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
42	Kecamatan Petabel	-	-	-	-	-	-
43	Kelurahan Tanjung Agung	-	-	-	-	-	-
44	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-
45	Badan Pembinaan Masyarakat, PP dan KB	-	-	-	-	-	-
46	Kantor Perpustakaan ds Anap Daerah	-	-	-	-	-	-
47	Dinas Pertanian Dan Kehutanan Pangan	33.287.179,00	33.287.179,00	33.287.179,00	33.287.179,00	33.287.179,00	33.287.179,00
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
49	Dinas Kehutanan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
50	Dinas pertambangan dan Energi	154.166.666,67	154.166.666,67	154.166.666,67	154.166.666,67	154.166.666,67	154.166.666,67
51	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan	51.166.666,67	51.166.666,67	51.166.666,67	51.166.666,67	51.166.666,67	51.166.666,67
52	Dinas Perikanan Dan Peternakan	17.083.333,33	17.083.333,33	17.083.333,33	17.083.333,33	17.083.333,33	17.083.333,33
	JUMLAH	43.529.652.158,83	43.529.652.158,83	43.529.652.158,83	43.529.652.158,83	43.529.652.158,83	43.529.652.158,83

h. BUPATI LEBONG

 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENYELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
38	Kecamatan Amen	91.760.239,08	91.760.239,08	91.760.239,08	91.760.239,08	91.760.239,08	91.760.239,08
39	Kelurahan Amen	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Liman Jaya	51.076.650,08	51.076.650,08	51.076.650,08	51.076.650,08	51.076.650,08	51.076.650,08
41	Kecamatan Pinang Belapis	48.798.540,83	48.798.540,83	48.798.540,83	48.798.540,83	48.798.540,83	48.798.540,83
42	Kecamatan Pelabai	69.953.033,25	69.953.033,25	69.953.033,25	69.953.033,25	69.953.033,25	69.953.033,25
43	Kelurahan Tanjung Agung	-	-	-	-	-	-
44	Badan Kepegawaian Daerah	190.059.246,83	190.059.246,83	190.059.246,83	190.059.246,83	190.059.246,83	190.059.246,83
45	Badan Pembudayaan Masyarakat, PF dan KB	202.555.714,08	202.555.714,08	202.555.714,08	202.555.714,08	202.555.714,08	202.555.714,08
46	Kantor Perpustakaan di Arsip Daerah	53.253.961,50	53.253.961,50	53.253.961,50	53.253.961,50	53.253.961,50	53.253.961,50
47	Dinas Pertanian Dan ketahanan Pangan	193.690.037,67	193.690.037,67	193.690.037,67	193.690.037,67	193.690.037,67	193.690.037,67
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	295.601.014,83	295.601.014,83	295.601.014,83	295.601.014,83	295.601.014,83	295.601.014,83
49	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	173.330.099,25	173.330.099,25	173.330.099,25	173.330.099,25	173.330.099,25	173.330.099,25
50	Dinas perimbangan dan Energi	93.163.622,58	93.163.622,58	93.163.622,58	93.163.622,58	93.163.622,58	93.163.622,58
51	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan	158.839.018,42	158.839.018,42	158.839.018,42	158.839.018,42	158.839.018,42	158.839.018,42
52	Dinas Perikanan Dan Peternakan	124.996.494,58	124.996.494,58	124.996.494,58	124.996.494,58	124.996.494,58	124.996.494,58
JUMLAH		19.480.612.567,92	19.480.612.567,92	19.480.612.567,92	19.480.612.567,92	19.480.612.567,92	19.480.612.567,92

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG

No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
40	Kecamatan Uram Jaya	19.705.110,00	19.705.110,00	46.665.110,00	19.705.114,00	31.705.111,00	24.475.110,00
41	Kecamatan Pinang Belapis	30.929.000,00	30.929.000,00	30.929.000,00	30.929.000,00	30.929.000,00	30.949.483,00
42	Kecamatan Pelalai	19.953.950,00	21.563.950,00	34.703.950,00	29.063.950,00	20.953.950,00	26.614.792,00
43	Kelurahan Tanjung Agung	9.375.167,00	22.125.167,00	9.375.167,00	9.375.167,00	9.375.167,00	9.375.167,00
44	Badan Kepegawaian Daerah	357.200.000,00	497.348.500,00	675.510.200,00	98.674.000,00	191.549.000,00	119.127.200,00
45	Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB	122.820.000,00	22.820.000,00	144.960.000,00	22.180.000,00	21.820.000,00	21.820.000,00
46	Kantor Perpustakaan di Arsip Daerah	95.564.000,00	141.081.000,00	160.940.000,00	52.645.000,00	46.119.000,00	46.139.000,00
47	Dinas Pertanian Dan ketahanan Pangan	1.899.857.382,00	209.850.000,00	26.504.000,00	80.500.000,00	4.067.232.900,00	-
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	341.870.400,00	165.373.000,00	180.829.000,00	140.873.000,00	95.373.000,00	180.899.000,00
49	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	523.450.000,00	523.450.000,00	522.950.000,00	522.900.000,00	514.400.000,00	512.300.000,00
50	Dinas pertambangan dan Energi	495.740.000,00	480.897.500,00	323.677.500,00	4.076.524.300,00	333.912.500,00	202.250.000,00
51	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pertubangan	63.177.500,00	382.302.500,00	58.925.000,00	58.925.000,00	60.450.000,00	53.925.000,00
52	Dinas Perikanan Dan Perikanan	182.311.565,00	349.211.559,00	187.311.569,00	189.311.558,00	193.311.556,00	193.311.565,00
JUMLAH		33.066.673.786,46	39.240.265.458,45	28.591.412.145,55	27.060.274.398,26	28.631.482.860,78	16.466.724.268,70

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENYELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,
 26/10/17
 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 ANGGARAN KAS PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

No	SKPD	Pagu Anggaran Penerimaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	-	-	-	-	-	-	-
11	Kantor Kesbangol Linmas	-	-	-	-	-	-	-
12	Kantor satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
13	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
14	KDHWakil KDH	-	-	-	-	-	-	-
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-	-	-	-
17	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-
18	Kantor Penghubung	-	-	-	-	-	-	-
19	Kecamatan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-
20	Kelurahan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-
21	Kecamatan Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-
22	Kelurahan Turan Loleng	-	-	-	-	-	-	-
23	Kelurahan Mubai	-	-	-	-	-	-	-
24	Kelurahan Taba Anyer	-	-	-	-	-	-	-
25	Kelurahan Tes	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-
27	Kelurahan Embong Panjang	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Lebong Utara	-	-	-	-	-	-	-
29	Kelurahan Pasar Muara Aman	-	-	-	-	-	-	-
30	Kelurahan Kampung Jawa	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-
33	Kantor Pelayanan Terpadu	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Topos	-	-	-	-	-	-	-
35	Kelurahan Topos	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Binjin Kuning	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Lebong sakti	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Amen	-	-	-	-	-	-	-
39	Kelurahan Amen	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda Dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja , Transmigrasi	-	-	-	-	-	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	-	-	-	-	-	-
11	Kantor kesbang/Limas	-	-	-	-	-	-
12	Kantor satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
13	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-
14	KDH/Wakil KDH	-	-	-	-	-	-
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-
17	Inspektorat	-	-	-	-	-	-
18	Kantor Penghubung	-	-	-	-	-	-
19	Kecamatan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-
20	Kelurahan Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-
21	Kecamatan Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-
22	kelurahan Turan Lelang	-	-	-	-	-	-
23	Kelurahan Mubai	-	-	-	-	-	-
24	kelurahan Tabo Anyar	-	-	-	-	-	-
25	Kelurahan Tias	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Kelurahan Embong Panjang	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Lebong Utara	-	-	-	-	-	-
29	Kelurahan Pasar Muara Aman	-	-	-	-	-	-
30	Kelurahan Kampung Jawa	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Lebong Atas	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Padang Bano	-	-	-	-	-	-
33	Kantor Pelayanan Terpadu	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Topos	-	-	-	-	-	-
35	Kelurahan Topos	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Lebong sakti	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Amen	-	-	-	-	-	-
39	Kelurahan Amen	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
40	Kecamatan Uram Jaya	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Polabai	-	-	-	-	-	-
43	Kelurahan Tanjung Agung	-	-	-	-	-	-
44	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-
45	Badan Pembertayaan Masyarakat, PP dan KB	-	-	-	-	-	-
46	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-	-	-
47	Dinas Pertanian Dan ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
49	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	-	-	-	-	-	-
50	Dinas perambangan dan Energi	-	-	-	-	-	-
51	Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan	-	-	-	-	-	-
52	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 M PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG, 6/10/17
 H. ROSJONSYAH

No	SKPD	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	10	11	12	13	14	15
40	Kecamatan Uram Jaya	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Pelibai	-	-	-	-	-	-
43	Kelurahan Tanjung Agung	-	-	-	-	-	-
44	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-
45	Badan Pembentayan Masyarakat, PP dan KB	-	-	-	-	-	-
46	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-	-	-
47	Dinas Pertanian Dan ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
49	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	-	-	-	-	-	-
50	Dinas pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-	-
51	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan	-	-	-	-	-	-
52	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.000.000.000,00	-	-	-	-	-

BUPATI LEBONG, N
 25/10/17
 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEBERSAMAAN DAERAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG